

# Pemerintah Provinsi Lampung Evaluasi Rencana Aksi

TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2019



**Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung**

*Jl. Cut Mutia No. 40 Telp. 0721. 473215 Fax. 470124*

*Bandar Lampung*

Web : [koperasiukm.lampungprov.go.id](http://koperasiukm.lampungprov.go.id)



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami sampaikan kehadirat Allah S.W.T. Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun Evaluasi Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Triwulan III Tahun 2019. Evaluasi Rencana Aksi ini berisi evaluasi perencanaan pembinaan bidang koperasi dan UMKM yang diharapkan keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan tujuan dan sasaran dapat tercapai sesuai Rencana Strategik 2015-2019. Pemberdayaan koperasi dan UMKM merupakan bagian yang terintegrasi dalam proses pembangunan daerah dalam rangka mencapai cita-cita masyarakat sebagai bangsa yang mandiri, maju, adil dan makmur serta sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dan kemajuan daerah.

Peningkatan produk Koperasi dan UMKM yang berkualitas, inovatif dan kreatif merupakan mata rantai yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan pemasaran dan jaringan usaha koperasi dan UMKM. Koordinasi antara produksi dan pemasaran mutlak dilakukan untuk mengarahkan pada upaya pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang padu dan berkesinambungan. Aspek penting dalam produksi adalah peningkatan produktivitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan sekaligus peningkatan nilai tambah dengan pemanfaatan teknologi yang dipandu oleh perkembangan ilmu pengetahuan, yang kaya inovasi produk.

Tentunya keberhasilan pemberdayaan koperasi dan UMKM dimaksud tidak terlepas dari hasil kerja keras seluruh jajaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung serta pemangku kepentingan yang telah bersama-sama memajukan koperasi dan UMKM. Akhir kata, semoga Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2019 Triwulan III Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat diharapkan sesuai dengan program pemberdayaan koperasi dan UMKM.

Bandar Lampung, Oktober 2019

KEPALA DINAS  
KOPERASI DAN UKM  
PROVINSI LAMPUNG

**Drs. ISRON FADTRICAR, M.H**  
Pembina Utama  
NIP. 19591001 198708 1 001



## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.1.1 Tugas, Pokok dan Fungsi .....	1
1.1.2 Sumber Daya Manusia .....	5
1.1.3 Struktur Organisasi .....	6
1.2 Maksud dan Tujuan .....	7
1.2.1 Maksud Penyusunan Evaluasi Rencana Aksi .....	7
1.2.2 Tujuan Penyusunan Evaluasi Rencana Aksi .....	7
1.3 Ruang Lingkup .....	7
BAB II. VISI DAN MISI RENSTRA 2015-2019 .....	8
2.1 Visi dan Misi .....	8
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....	10
3.1 Tujuan .....	10
3.2 Program dan Kegiatan .....	12
BAB IV. PENUTUP .....	38
LAMPIRAN EVALUASI RENCANA AKSI .....	39



## **BAB. I PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

#### **1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung, Tugas Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan Provinsi di bidang Koperasi dan UMKM berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pengaturan dan pembinaan di bidang Koperasi dan UMKM;
- b. Kebijakan, pengesahan pendirian koperasi dan perubahan anggaran dasar serta pengurusan badan hukum koperasi tingkat provinsi;
- c. Pembinaan dan pengawasan usaha simpan pinjam koperasi dan pemberian ijin usaha simpan pinjam tingkat provinsi;
- d. Pemfasilitasian tugas pembantuan dalam rangka pengawasan layanan simpan pinjam Koperasi di Tingkat Provinsi;
- e. Pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang perkoperasian dan UMKM;
- f. Pemberian bimbingan dan teknis pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi;
- g. Pemberian advokasi perlindungan kepada Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi Lampung;
- h. Penetapan peraturan dan kebijakan dalam rangka penumbuhan kewirausahaan baru, iklim usaha kondusif bagi UMKM di Tingkat Provinsi;



- i. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi;
- j. Pemfasilitasian akses pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi;
- k. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pemberdayaan dalam rangka pembinaan SDM Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi;
- l. Pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perizinan dan Kelembagaan;
- d. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
- e. Bidang Pemberdayaan Koperasi;
- f. Bidang Pemberdayaan Usaha, Kecil dan Menengah;
- g. UPTD Badiklatkop dan UMKM;
- h. UPTD Perkuatan Modal KUMKM;
- i. UPTD PLUT;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional Widyaiswara.

❖ **Kepala Dinas**

1. Kepala Dinas Koperasi dan UKM mempunyai tugas pokok memimpin, mengendalikan serta mengkoordinasikan Pelaksanaan tugas Dinas Koperasi dan UKM yang menjadi kewenangannya, tugas dekonsentrasi dan pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Gubernur, serta tugas lainnya yang sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi dan UKM mempunyai fungsi :



- a. Perumusan kebijakan, pengaturan dan penetapan standar/ pedoman pelaksanaan tugas dibidang Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Perumusan program kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai pedoman kerja;
- c. Penyediaan dukungan pengembangan Koperasi dan UKM serta kerjasama antar kabupaten/ kota bidang koperasi dan UKM;
- d. Pembinaan dan pemberdayaan Koperasi dan UKM;
- e. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- f. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi;
- g. Pengelolaan kesekretariatan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

❖ **Sekretariat**

1. Sekretariat mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan melaksanakan kegiatan surat menyurat, rumah tangga, perencanaan, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, pembinaan organisasi, tatalaksana dan perundang – undangan serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana dan program;
  - b. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
  - c. Pengelolaan urusan keuangan;
  - d. Pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan perlengkapan;
  - e. Penyelenggaraan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, humas, dan penyusunan perundang-undangan;





- f. Penyiapan bahan perumusan rencana dan program serta memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- g. Penyelenggaraan monitoring dan pengendalian persiapan dan laporan dinas; dan
- h. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Sekretariat Dinas Koperasi dan UKM dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat Dinas Koperasi dan UKM, membawahi :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Sub Bagian Keuangan; dan
- Sub Bagian Perencanaan.

Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud di atas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

a. Bidang Perzinan dan Kelembagaan, membawahi :

- 1) Seksi Perzinan;
- 2) Seksi Kelembagaan;
- 3) Seksi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi;

b. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, membawahi :

- 1) Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi;
- 2) Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi;
- 3) Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi

c. Bidang Pemberdayaan Koperasi, membawahi :

- 1) Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;
- 2) Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi;
- 3) Seksi Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Koperasi;



d. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, membawahi :

- 1) Seksi Fasilitasi Usah Kecil dan Menengah;
- 2) Seksi Pengembangan Penguatan dan Perlindungan UKM;
- 3) Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan;

e. UPTD Badiklatkop dan UMKM, membawahi :

- 1) Sub Bagian Tata Usaha;
- 2) Seksi Penyelenggara;
- 3) Seksi Monitoring dan Evaluasi;

f. UPTD Perkuatan Modal KUMKM, membawahi :

- 1) Sub Bagian Tata Usaha;
- 2) Seksi Teknis Operasional;
- 3) Seksi Pembinaan dan Pengawasan;

g. UPTD PLUT, membawahi :

- 1) Sub Bagian Tata Usaha;
- 2) Seksi Promosi dan Jaringan Usaha;
- 3) Seksi Pelayanan Usaha;

### **1.1.2 Sumberdaya Manusia**

Sumberdaya manusia pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dapat dilihat pada table 1.1.2.1berikut :



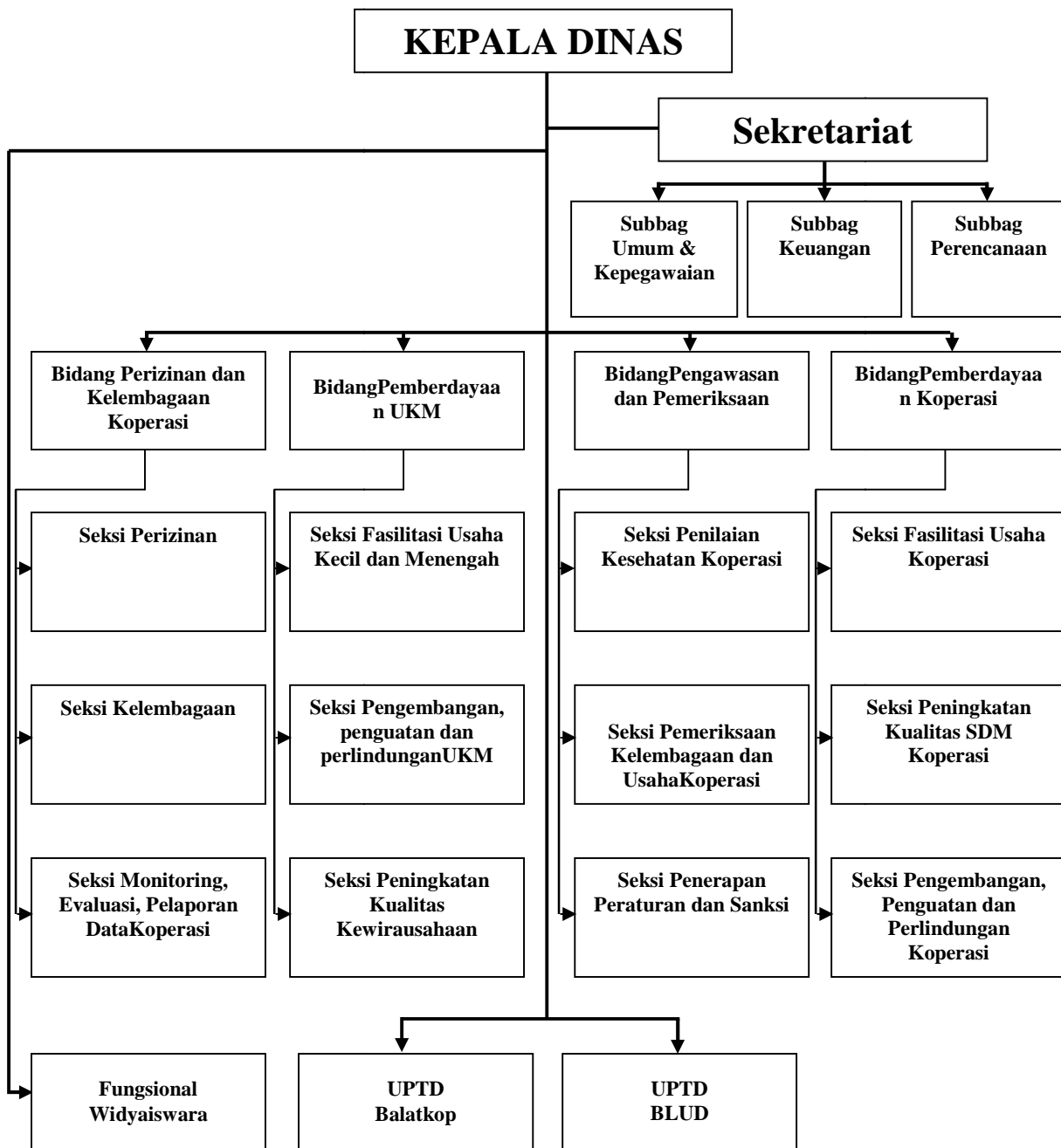


**Tabel. 1.1.2.1 Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

JUMLAH PEGAWAI	KUALIFIKASI KOPERASI DAN UKM	PANGKAT/GOL	JUMLAH PEJABAT	
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL
1	2	3	4	5
PNS : 93	S3 : 1	IV/e : 1	Ess IV = 20	Widya Iswara. =3 org
PTHL : 8	S2 : 19	IV/d : 1	Ess III = 5	
	S1 : 50	IV/c : 1	Ess II = 1	
	D4 : -	IV/b : 3		
	D3 : 3	IV/a : 13		
	D2 : -	III/d : 34		
	D1 : -	III/c : 12		
	SLTA : 19	III/b : 13		
	SLTP : 1	III/a : 6		
	SD : -	II/d : -		
		II/c : 3		
		II/b : 4		
		II/a : 2		
		I/d : -		
		I/c : -		
		I/b : -		
		I/a : -		
Jumlah PNS	PNS : 93			

### **1.1.3 Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung, Tugas Dinas Koperasi dan UKM adalah menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang koperasi dan UKM berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagan struktur organisasi yang ada pada Dinas Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut :





## **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1.2.1 Maksud Penyusunan Evaluasi Rencana Aksi**

Maksud dari penyusunan Evaluasi Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Triwulan III adalah sebagai implementasi dari penjabaran Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2015-2019.

### ***1.2.2 Tujuan Penyusunan Evaluasi Rencana Aksi***

Tujuan dari penyusunan Evaluasi Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Triwulan III adalah sebagai dokumen evaluasi perencanaan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

## **1.3 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Evaluasi Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Triwulan III meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, hingga kebutuhan dana indikatif bagi evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019.



## **BAB. II VISI DAN MISI RENSTRA 2015-2019**

### **2.1 VISI DAN MISI**

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk di wujudkan. Secara *ontologis*, visi merupakan *das sollen*, yaitu apa yang sebenarnya menjadi tujuan atau keinginan yang ideal yang disepakati oleh seluruh stakeholders dan terkristalisasi dalam bentuk jati diri. Pada umumnya visi dibangun untuk mendorong semangat seluruh stakeholders agar dapat berperan serta aktif dalam pembangunan dan sekaligus sebagai inspirasi untuk menggerakkan seluruh kemampuan stakeholders untuk secara bersama dan sinergis membangun daerah.

Dalam dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019, visi pembangunan Provinsi Lampung adalah :“**LAMPUNG MAJU DAN SEJAHTERA 2019**”. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang koperasi dan UMKM harus mendukung terwujudnya visi tersebut.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, dirumuskan 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah.
2. Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, iptek dan inovasi, budaya masyarakat, dan kehidupan beragama yang toleran.
4. Meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Menegakkan supremasi hukum, mengembangkan demokrasi berbasis kearifan lokal, dan memantapkan pemerintahan yang baik dan antisipatif.

Sesuai dengan Visi dan Misi Provinsi Lampung, maka Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung akan berpedoman pada Misi ke 1 (satu) dari 5 misi yang telah



dijabarkan pada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, yaitu Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirain daerah.

Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*pro growth*) melalui pengembangan potensi dan keunggulan yang dimiliki provinsi Lampung dengan memperkuat investasi (*pro investment*) diberbagai sektor dan ekonomi yang berbasis kerakyatan dengan kemitraan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat ditandai juga oleh upaya pemerataan dengan *trickledown effect* yang tinggi.

Upaya memperkuat ekonomi Lampung dengan mengembangkan potensi dan keunggulan yang dimiliki dengan orientasi ekonomi nasional dan global. Ekonomi berbasis agro terus dimantapkan dan diperkuat, kemudian ditransformasikan ke ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa berbasis teknologi. Investasi baru (dalam dan luar negeri) harus dipacu untuk memperluas kesempatan kerja. Pembangunan ekonomi dan pemerataannya harus diorientasikan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan jumlah penduduk miskin. Pembangunan ekonomi tidak mengeksploitasi sumber daya alam dan tidak merusak lingkungan.

Perkuatan ekonomi merupakan penciptaan daya saing berkelanjutan atau *sustainable competitive advantage* sebagai hasil dari pengelolaan sumber daya didukung kompetensi yang tinggi (*core competence*). Produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan dengan kualitas tinggi dan berdaya saing sehingga meningkatkan nilai tambah produk dan kemandirian daerah. Penguatan kemandirian daerah diidentifikasi oleh kapasitas fiskal yang tinggi terutama dicirikan oleh pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi. Dampak akhir dari pembangunan ekonomi Lampung adalah kesejahteraan sosial yang berkeadilan. Kesejahteraan dicapai melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.



## **BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **3.1 TUJUAN DAN SASARAN**

Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi tersebut, ditetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.1. Matriks Indikator Tujuan dan Sasaran

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>TARGET PADA AKHIR PERIODE RENSTRA (2019)</b>	<b>SATUAN</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Meningkatkan peran koperasi dalam perekonomian Lampung	1 Persentase Pertumbuhan Jumlah Koperasi aktif	100%	Persen
2	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM	1 Persentase pertumbuhan wirausaha baru	100%	Persen
		2 Persentase pelaku usaha yang bernilai tambah dari aspek sertifikasi, HAKI dan paten	100%	Persen
		3 Nilai Evaluasi AKIP Dinas	BB%	Indeks



## Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					SATUAN
			1	2	3	4	5	
			TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya jumlah skala dan kapasitas usaha koperasi	1 Persentase Pertumbuhan Jumlah Koperasi aktif	17%	37%	57%	78%	100%	Persen
2.	Meningkatnya wirausaha yang baru, tangguh dan mandiri	1 Persentase pertumbuhan wirausaha baru	17%	33%	53%	77%	100%	Persen
3.	Meningkatnya standarisasi pengelola koperasi dan UMKM	1 Persentase pelaku usaha yang bernilai tambah dari aspek sertifikasi, HAKI dan paten	11%	30%	52%	75%	100%	Persen
4.	Meningkatnya kinerja pelaporan dan keuangan dinas (sasaran pendukung)	1 Nilai Evaluasi AKIP Dinas	CC	B	B	BB	BB	Indeks





### **3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN**

Dinas Koperasi dan UKM akan melaksanakan sebanyak 11 program dengan 44 kegiatan pada tahun 2019, yaitu :

- 1) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**
  - a. Penilaian kesehatan bagi KSP/USP dan KJKS/UJKS
  - b. Temu konsultasi pemberdayaan usaha KUMKM
  - c. Sosialisasi KUMK 15 kab/kota
  - d. Pengembangan dan promosi produk-produk unggulan daerah
  - e. Pendampingan pusat layanan usaha terpadu (PLUT)
  - f. Pengembangan pusat layanan usaha terpadu (PLUT)
  - g. Sosialisasi kebijakan bidang pengawasan dan pemeriksaan
  - h. Pengawasan kepatuhan legalitas koperasi dan sanksi
  - i. Peningkatan kemitraan antara koperasi dengan perusahaan pabrikan dan perkulakan
  - j. Percepatan pengembangan jaminan kredit daerah
  
- 2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
  - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - b. Penyediaan jasa administrasi keuangan
  - c. Penyediaan jasa kebersihan kantor
  - d. Penyediaan alat tulis kantor
  - e. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
  - f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - g. Penyediaan makanan dan minuman rapat
  - h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
  - i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
  - j. Pameran dan Promosi Pembangunan
  - k. Penatausahaan barang milik daerah
  
- 3) Program Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD Perkuatan Prmodalan KUMKM**
  - a. Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD
  - b. Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Bergulir BLUD
  
- 4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
  - a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
  - b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
  - c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
  
- 5) Program Pemberdayaan Usaha Koperasi dan UMKM**
  - a. Peningkatan jenis usaha koperasi



- b. Peningkatan dan perluasan akses permodalan bagi koperasi
- 6) Program Pengembangan Kelembagaan Koperasi dan UMKM**
- a. Diklat Kewirausahaan bagi pengelola koperasi wanita
- 7) Program Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan UMKM**
- a. Bimtek akuntansi koperasi bagi pengelola koperasi jasa keuangan
  - b. Pelatihan peningkatan kapasitas SDM koperasi dan UMKM
  - c. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan SDM Koperasi
- 8) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
- a. Pengelolaan SDM Umum, Kepegawaian dan Diklat Pegawai
- 9) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
- a. Penyusunan Laporan Keuangan
  - b. Penyusunan Renstra
  - c. Penyusunan data kepegawaian
  - d. Penyusunan laporan capaian kinerja
  - e. Monev dan sinkronisasi program
- 10) Program Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**
- a. Kinerja Penilaian Koperasi Berprestasi dan Hari Koperasi Tingkat Provinsi
  - b. Koordinasi Kelembagaan dan Up -Dating Data Keragaan Koperasi
  - c. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM
  - d. Pembinaan dan evaluasi monitoring terhadap koperasi
  - e. Peningkatan kualitas tata laksana koperasi melalui prizinan koperasi simpan pinjam
- 11) Program Perencanaan Pembangunan Daerah**
- a. Penyelenggaraan Musrenbang SKPD



LAMPIRAN

***MATRIK EVALUASI RENCANA AKSI***

***TRIWULAN III***



## BAB. IV PENUTUP


Evaluasi Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Triwulan III Tahun 2019 disusun sebagai dokumen evaluasi perencanaan yang menguraikan sasaran strategis, indikator kinerja serta kebutuhan anggaran indikatif program dan kegiatan yang di dalamnya menggambarkan realisasi capaian target kinerja program kegiatan dimaksud.

Evaluasi Rencana Aksi ini dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi rencana kerja (renja) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung.

Semoga Evaluasi Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Triwulan II tahun 2019 menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintah di bidang pengawasan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sesuai dengan visi Pemerintah Provinsi Lampung yaitu "*Lampung Maju dan Sejahtera Tahun 2019*".

Bandar Lampung, Oktober 2019

**KEPALA DINAS  
KOPERASI DAN UKM  
PROVINSI LAMPUNG,**

  
**Drs. ISON FADTRICAR, M.H.**  
Pembina Utama  
NIP. 19591001 1987 1 001

MATRIKS EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA SKPD TAHUN 2019 Triwulan III

SKPD : DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	Target Capaian	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Jadwal Kegiatan TW 3			Realisasi Pelaksanaan TW 3			
									1	2	3	1	2	3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9			10			
				<b>NON URUSAN</b>			<b>1.655.976.280</b>	<b>1.051.972.497</b>							
				<b>PROGRAM SETIAP SKPD</b>			<b>1.655.976.280</b>	<b>1.051.972.497</b>							
				<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terwujudnya pelayanan perkantoran yang memenuhi tertib administrasi</b>		<b>1.193.855.979</b>	<b>779.230.508</b>							
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembiayaan rekening telepon, air dan listrik	12 bulan	316.418.979,00	202.356.708,00							
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah pembiayaan penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	466.930.000,00	307.750.000,00							
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah pembiayaan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	120.000.000,00	79.734.000,00							
				Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah pembiayaan penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	25.740.000,00	14.889.000,00							
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah pembiayaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12 bulan	5.000.000,00	3.419.600,00							
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah pembiayaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	19.080.000,00	12.720.000,00							
				Penyediaan makanan dan minuman rapat	Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat	12 bulan	24.935.000,00	10.452.000,00							
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	10 kali	80.000.000,00	40.648.800,00							
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	18 kali	60.000.000,00	38.510.000,00							
				Pameran dan Promosi Pembangunan	Jumlah pembiayaan Pameran dan Promosi Pembangunan	1 event	70.000.000,00	68.750.400,00							
				Penatausahaan barang milik daerah	Jumlah Penatausahaan barang milik daerah	4 dokumen	5.752.000,00	0,00							
				<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Tersedianya sarana dan prasarana aparatur</b>		<b>212.574.612</b>	<b>97.318.936</b>							
				Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 paket	33.615.612,00	0,00							
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pembiayaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional	12 bulan	160.084.000,00	88.568.936,00							
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 bulan	18.875.000,00	8.750.000,00							
				<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Terwujudnya pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>		<b>115.330.000</b>	<b>76.800.000</b>							
				Pengelolaan SDM Umum, Kepegawaian dan Diklat Pegawai	Jumlah pengelolaan SDM umum, kepegawaian dan diklat pegawai	12 bulan	115.330.000,00	76.800.000,00							
				<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Terwujudnya pelaksanaan peningkatan sistem capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan</b>		<b>134.215.689</b>	<b>98.623.053</b>							
				Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan	13 dokumen	7.031.036,00	5.033.200,00							
				Penyusunan Renstra	jumlahpembayaan penyusunan renstra	1 dokumen	9.942.679,00	4.442.679,00							

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	Target Capaian	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Jadwal Kegiatan TW 3			Realisasi Pelaksanaan TW 3		
									1	2	3	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9			10		
Meningkatnya wirausaha yang baru, tangguh dan mandiri	Persentase pertumbuhan wirausaha baru	-	-	Penyusunan data kepegawaian	Jumlah pembiayaan Penyusunan data kepegawaian	12 bulan	41.642.000,00	25.000.000,00						
				Penyusunan laporan capaian kinerja	Jumlah pembiayaan Penyusunan laporan capaian kinerja	11 dokumen	25.599.974,00	23.581.974,00						
				Monev dan sinkronisasi program	Jumlah monev dan sinkronisasi program	4 kali	50.000.000,00	40.565.200,00						
				<b>WAJIB</b>			<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>						
				<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>			<b>60.133.988</b>	<b>58.707.630</b>						
				<b>Program perencanaan pembangunan daerah Tahunan</b>	<b>Terwujudnya pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan</b>		<b>60.133.988</b>	<b>58.707.630</b>						
				Penyelenggaraan Musrenbang SKPD	Jumlah penyelenggaraan musrenbang skpd	1 Dokumen	60.133.988,00	58.707.630,00						
				<b>KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>			<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>						
				<b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah</b>	<b>Meningkatnya jumlah KUMKM yang terfasilitasi peningkatan sistem pendukung usahanya</b>		<b>1.007.964.984</b>	<b>493.049.652</b>						
				Penilaian kesehatan bagi KSP/USP dan KJKS/UJKS	jumlah ksp/usp dan kjks/ujks yang di nilai kesehatannya	30 koperasi	81.002.874,00	80.598.550,00						
				Temu konsultasi pemberdayaan usaha KUMKM	Jumlah Temu konsultasi pemberdayaan usaha KUMKM	2 kali	123.982.500,00	82.381.500,00						
				Sosialisasi KUMK 15 kab/kota	Sosialisasi KUMK 15 kab/kota	15 kali	141.288.000,00	105.917.000,00						
				Pengembangan dan promosi produk-produk unggulan daerah	Jumlah Pengembangan dan promosi produk-produk unggulan daerah	5 kali	300.000.000,00	35.180.000,00						
				Pendampingan pusat layanan usaha terpadu (PLUT)	Jumlah Pendampingan pusat layanan usaha terpadu (PLUT)	50 orang	75.851.200,00	75.851.200,00						
				Pengembangan pusat layanan usaha terpadu (PLUT)	Jumlah Pengembangan pusat layanan usaha terpadu (PLUT)	80 orang	72.239.784,00	0,00						
				Sosialisasi kebijakan bidang pengawasan dan pemeriksaan	Jumlah Sosialisasi kebijakan bidang pengawasan dan pemeriksaan	30 orang	22.752.750,00	22.752.630,00						
				Pengawasan kepatuhan legalitas koperasi dan sanksi	Jumlah Pengawasan kepatuhan legalitas koperasi dan sanksi	30 koperasi	100.000.000,00	0,00						
				Peningkatan kemitraan antara koperasi dengan perusahaan pabrikaan dan perkulakan	Jumlah Peningkatan kemitraan antara koperasi dengan perusahaan pabrikaan dan perkulakan	15 koperasi	46.814.556,00	46.335.556,00						
				Percepatan pengembangan jaminan kredit daerah	Jumlah percepatan pengembangan jaminan kredit daerah	1 perusahaan	44.033.320,00	44.033.216,00						
				<b>Program Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM</b>	<b>Meningkatnya jumlah KUMKM yang mendapat fasilitas akses permodalan BLUD</b>		<b>584.074.126</b>	<b>37.022.000</b>						
Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD	Jumlah pembiayaan Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD	12 bulan	547.052.000,00	0,00										
Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Bergulir BLUD	Jumlah KUMKM yang termonitoring dan terevaluasi pemanfaatan dana bergulir BLUD	180 KUMKM	37.022.126,00	37.022.000,00										
<b>Program pemberdayaan Usaha Koperasi dan UMKM</b>	<b>Meningkatnya jenis usaha koperasi</b>		<b>97.178.080</b>	<b>0</b>										
Peningkatan jenis usaha koperasi	Jumlah Peningkatan jenis usaha koperasi	15 koperasi	63.105.200,00	0,00										
Peningkatan dan perluasan akses permodalan bagi koperasi	Jumlah Peningkatan dan perluasan akses permodalan bagi koperasi	15 koperasi	34.072.880,00	0,00										



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	Target Capaian	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Jadwal Kegiatan TW 3			Realisasi Pelaksanaan TW 3		
									1	2	3	1	2	3
Meningkatnya jumlah skala dan kapasitas usaha koperasi	Persentase Perkembangan Jumlah Koperasi aktif			Program Pengembangan Kelembagaan Koperasi dan UMKM	Meningkatnya Diklat Kewirausahaan bagi pengelola koperasi wanita		95.000.000,00	0,00						
				Diklat Kewirausahaan bagi pengelola koperasi wanita	Jumlah Diklat Kewirausahaan bagi pengelola koperasi wanita	35 orang	95.000.000,00	0,00						
				Program peningkatan kualitas SDM Koperasi dan UMKM	Meningkatnya pemberdayaan usaha koperasi dan UMKM		3.108.021.931	1.457.272.810						
				Bimtek akuntansi koperasi bagi pengelola koperasi jasa keuangan	Jumlah Bimtek akuntansi koperasi bagi pengelola koperasi jasa keuangan	30 orang	29.873.796,00	0,00						
				Pelatihan peningkatan kapasitas SDM koperasi dan UMKM	Jumlah Pelatihan peningkatan kapasitas SDM koperasi dan UMKM	780 orang	2.921.420.000,00	1.457.272.810,00						
				Monitoring dan Evaluasi Pengembangan SDM Koperasi	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pengembangan SDM Koperasi	180 orang	156.728.135,00	0,00						
				Program peningkatan dan pengembangan Kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Meningkatnya Jumlah koperasi dan UMKM yang meningkat dan berkembang usahanya serta kelembagaannya		307.508.611	182.688.750						
				Kinerja Penilaian Koperasi Berprestasi dan Hari Koperasi Tingkat Provinsi	Jumlah Kinerja Penilaian Koperasi Berprestasi dan Hari Koperasi Tingkat Provinsi	15 lembar	102.318.500,00	80.271.350,00						
				Koordinasi Kelembagaan dan Up-Dating Data Keragaan Koperasi	Jumlah Koordinasi Kelembagaan dan Up-Dating Data Keragaan Koperasi	15 kali	75.000.000,00	27.600.000,00						
				Monitoring dan Evaluasi Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM	4 kali	16.068.316,00	0,00						
				Pembinaan dan evaluasi monitoring terhadap koperasi	Jumlah Pembinaan dan evaluasi monitoring terhadap koperasi	19 koperasi	39.121.795,00	0,00						
				Peningkatan kualitas tata laksana koperasi melalui prizinan koperasi simpan pinjam	Jumlah Peningkatan kualitas tata laksana koperasi melalui prizinan koperasi simpan pinjam	50 koperasi	75.000.000,00	74.817.400,00						
							6.915.858.000	3.280.713.339						

BANDAR LAMPUNG, Oktober 2019  
KEPALA DINAS.

  
Drs. ISRON FADTRICAR, M.H.  
Pembina Utama  
NIP. 19591001 1987 1 001